

SKRIPSI

**INSTITUSIONALISASI PARTAI PERINDO DI MAKASSAR
(PERAN ELIT DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN POLITIK PARTAI)**



OLEH :

MUH. SULFIHIDAYATULLAH

E041171009

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**INSTITUSIONALISASI PARTAI PERINDO DI MAKASSAR
(PERAN ELIT DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN POLITIK PARTAI)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

OLEH :

MUH. SULFIHIDAYATULLAH

E041171009

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022


HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
INSTITUSIONALISASI PARTAI PERINDO DI MAKASSAR
(PERAN ELIT DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN POLITIK PARTAI)

Disusun dan Diajukan Oleh:
MUH. SULFIHIDAYATULLAH
E041171009

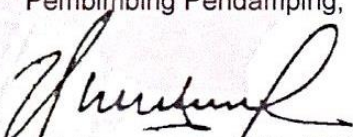
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada tanggal 28 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui,



Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Muhammad S.Ip, M.Si.
NIP 197109171997031001

Pembimbing Pendamping,


A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si.
NIP 198011142008121002

Mengetahui,
Ketua Departemen
Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D
NIP 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
INSTITUSIONALISASI PARTAI PERINDO DI MAKASSAR
(PERAN ELIT DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN POLITIK PARTAI)

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH. SULFIHIDAYATULLAH

E041171009

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 28 Januari 2022.

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si. (.....)

Sekretaris : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Dr. Phill Sukri, S.IP, M.Si. (.....)

Anggota : Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Sulfidayatullah

NIM : E041171009

Program Studi : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

"Institusionalisasi Partai Perindo di Makassar (Peran Elit dalam Pengembangan Jaringan Partai Politik)" adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Februari 2022

Yang menyatakan,



Muh. Sulfidayatullah

ABSTRAK

MUH. SULFIHIDAYATULLAH. NIM E041171009. INSTITUSIONALISASI PARTAI PERINDO DI MAKASSAR (PERAN ELIT DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN POLITIK PARTAI). Dibawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad, M.Si. dan A.Ali Armunanto S.I.P., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran elit dalam pengembangan jaringan politik partai di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan Metode wawancara dan studi pustaka. Pada teknik wawancara, peneliti mewawancarai informan yang dapat memberikan penjelasan secara akurat dan pada teknik studi pustaka adalah dengan melakukan pengumpulan data dengan Tinjauan pustaka berupa sumber data, referensi atau dokumen-dokumen penting dan relevan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan jaringan politik partai Perindo di kota Makassar didukung dari peran figure dan kemampuan finansial elit yang mampu mendorong penerimaan partai di masyarakat dan pemanfaatan media yang begitu massif sehingga partai dengan mudah memperkenalkan organisasi dan elit politiknya, lewat media pula pesan-pesan politik mampu disampaikan melalui iklan dan tayangan yang telah diatur sedemikian rupa untuk maksud serta pesan tertentu. Orang-orang diluar organisasi (partai) juga terlibat aktif dalam proses politik atau disebut sebagai simpatisan walaupun tidak berperan aktif secara struktural organisasi namun dukungan dan support simpatisan begitu berarti dalam mengembangkan jaringan politik partai.

ABSTRACT

MUH. SULFIHIDAYATULLAH. NIM E041171009. INSTITUSIONALISASI PARTAI PERINDO DI MAKASSAR (PERAN ELIT DALAM PENGEMBANGAN JARINGAN POLITIK PARTAI). Under the guidance of Prof. Dr. Muhammad, M.Si. and A. Ali Armunanto S.I.P., M.Si.

This study aims to determine the role of elites in the development of party political networks in the city of Makassar. This study used qualitative research methods. The data obtained using the interview method and literature study. In the interview technique, the researcher interviewed informants who could provide an accurate explanation and the literature study technique was to collect data with a literature review in the form of data sources, references or important documents relevant to the research.

The results of the study indicate that the development of the Perindo party political network in Makassar city is supported by the role of figures and elite financial capabilities that are able to boost party acceptance in society and the massive use of media so that the party easily introduces its organization and political elite, through the media as well as messages. Politics can be conveyed through advertisements and impressions that have been arranged in such a way for certain purposes and messages. People outside the organization (party) are also actively involved in the political process or referred to as sympathizers, although they do not play an active role in organizational structure, but the support and support of sympathizers is very meaningful in developing the party's political network.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Institusionalisasi Partai Perindo Di Makassar (Peran Elit Dalam Pengembangan Jaringan Politik Partai)" . tak lupa juga shalawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini di susun dan diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana Ilmu Politik, pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang di miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan oleh penulis untuk dapat menyempurnakan tulisan ini dengan kiranya dapat bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya. Selain itu, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis : bapak Muhazzab dan ibu Hasniar Rahman atas segala cinta, kasih sayang yang tulus, yang senantiasa memberikan doa dan menjadi penyemangat serta pengorbanan yang tak dapat tergantikan dalam kehidupan penulis hingga saat ini. Skripsi ini dapat di selesaikan karena banyaknya dukungan dan bantuan yang diterima oleh

penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, melalui Skripsi ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Prof.dwia Aries Tina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof.Dr Armin ,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
3. Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad S.Ip, M.Si. selaku pembimbing utama dan bapak A. Ali Armunanto, S.Ip, M.Si. selaku pembimbing pendamping yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai
5. Seluruh dosen pengajar Prof. Armin, M.Si; Prof. Muhammad, M.Si; Dr. Muhammad saad, MA; Drs. H.Andi Yakub, M.Si, Ph.D; Dr. Phill; Sukri, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si; Dr. Ariana Yunus S.IP, M.Si; Andi Naharuddin, S.IP,M.Si; Andi Ali Armunanto S.IP, M.Si; Sakinah Nadir, S.IP, M.Si; Zulhajar S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Hariyanto S.IP, M.A; Ummi Suci Fatihah B, S.IP, M.Si; terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta kuliah inspiratifnya.

6. Seluruh staf pegawai Departemen Ilmu Politik yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas.
7. Dewan pimpinan daerah partai perindo kota makassar
8. Keluarga besar Himapol Fisip Unhas yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya kepada penulis
9. Keluarga besar IKMB-UNHAS yang telah memberikan ruang belajar diluar kampus serta dukungannya kepada penulis
10. Keluarga besar Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Makassar Timur atas dukungan dan petunjuk nya kepada penulis
11. Teman-teman seperjuangan ilmu politik , terima-kasih atas kebersamaan ,kerja sama, waktu dan kenangan selama kuliah.
12. Terima kasih juga tak lupa penulis ucapkan kepada para informan atas waktu yang telah diluangkan dan atas keterbukaan kepada penulis memperoleh informasi yang penulis butuhkan.

Sekali lagi terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan, bimbingan, dukungan dan perhatian serta kerjasamanya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 17 Januari 2021

Muh. Sulfidayatullah

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ivi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Teori Elit	8
2.3 Peran Elit	121
2.4 Partai Politik.....	12
2.5 Hukum Besi Oligarki Robert Michels	185
2.6 Institusionalisasi Partai Politik Huntington	19
2.7 Kerangka Pemikiran Skema Kerangka Pikir	20
2.8 Skema Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	212
3.1 Lokasi Penelitian.....	212
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian	212
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	223
3.4 Informan Penelitian	234

3.5 Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	267
4.1 Kota Makassar	267
4.2 Gambaran Umum DPD Partai Perindo Kota Makassar	289
4.3 Gambaran Umum Partai Perindo	30
4.4 Visi dan Misi.....	345
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	367
5.1 Jejaring partai perindo kota makassar.....	367
5.2 Mekanisme pembentukan struktural dan program partai.....	48
5.3 Peran elit dalam pengembangan jejaringan politik partai	53
5.4 Pemilihan legislatif kota Makassar tahun 2019.....	58
BAB VI PENUTUP	63
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	629

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia selalu menjadi momentum bagi para kelompok ataupun elit dalam melaksanakan tujuan dan cita-cita organisasinya terkhusus kepada partai politik. Momentum demokrasi memunculkan kontestasi dalam bentuk pemilihan umum baik itu di tingkat Daerah, Provinsi sampai pusat, hal ini menjadi sesuatu yang wajar mengingat tingkat partisipatif partai politik di Indonesia yang begitu besar. Partai politik adalah organisasi yang didalamnya terdapat orang-orang yang mempunyai visi ataupun Ideologi yang sama, dibentuk secara sukarela dengan tujuan mencapai tampuk kekuasaan politis, serta menjadi ruang dalam menjembatani elit politik untuk bertarung dalam kompetisi di pemilihan umum. Partai politik sebagai sebuah instrumen demokrasi menjadi bagian yang intim sebagai pilar demokrasi itu sendiri, dimana partai politik sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat dalam konteks mengedukasi dan mencerdaskan merujuk pada fungsi partai politik sebagai pendidikan politik. Sejarah per politikan di Indonesia, jika dirunut dari beberapa waktu yang lalu partai politik menunjukkan peran dan fungsi dalam memilih dan merumuskan arah perpolitikan yang lebih terbaharu dalam wujud mendorong partisipatipasi

pemilih di pemilihan umum, mengingat arus kepentingan juga menjadikan partai politik sebagai kendaraan politis bagi kader partai itu sendiri. Posisi partai politik dalam sistem perpolitikan di Indonesia begitu penting melihat sistem dan ideologi yang di bangun oleh partai politik menjadi warna dan identitas tersendiri di setiap partai yang berkompetisi di pemilihan umum. Tiap-tiap rezim memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi keberadaan partai politik merupakan pilar yang berwadahkan sistem pemilihan umum yang menentukan bagaimana suatu rezim dilaksanakan, baik atau buruk. Oleh karena itu, perbaikan keduanya merupakan keniscayaan yang harus terus diupayakan.¹ Namun upaya untuk membentuk Partai politik tidaklah demikian mudah, hal-hal mendasar perlu di perhatikan seperti pra syarat untuk mendirikan Partai dan pemenuhan syarat Hukum seperti yang dimuat pada UU no 2 Tahun 2011 tentang Partai politik.

Partai Persatuan Indonesia merupakan salah satu partai politik yang baru saja muncul ke permukaan sebagai salah satu peserta dalam pemilihan umum. Partai Persatuan Indonesia atau yang akrab disebut dengan partai Perindo merupakan partai yang dibentuk oleh Hary Tanoesoedibjo bersama beberapa jejaring elit setelah hijrah dari partai Nasdem yang sebelumnya di ketuai oleh Surya Paloh. Partai Perindo di Sulawesi selatan (Makassar) dimana sebelumnya merupakan organisasi masyarakat (ormas) Persatuan

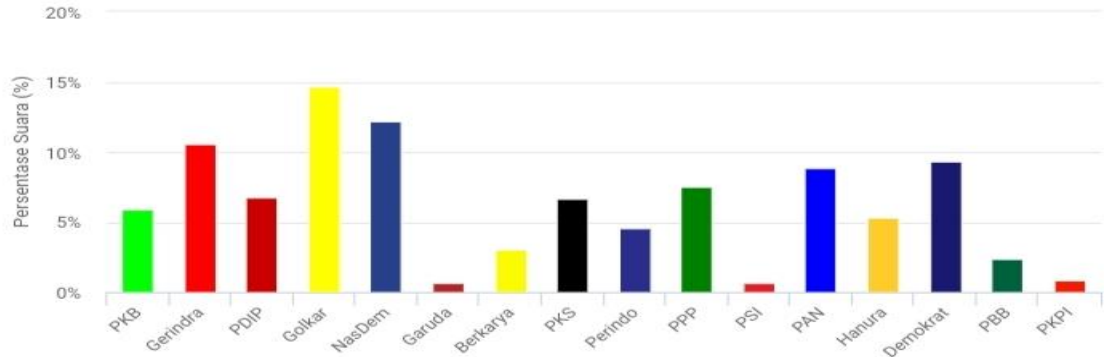
¹ Aulia, Dian. 2016. "Penguatan Demokrasi: Partai Politik Dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi", Masyarakat Indonesia, Vol.42, No.1, Hal. 115-125

Indonesia yang menghimpun beberapa elit-elit lokal khususnya pada dewan pimpinan daerah kota Makassar (DPD). Ormas persatuan Indonesia inilah yang menjadi cikal bakal dalam berdirinya partai perindo di Makassar dan Sulawesi selatan ataupun bisa dikatakan sebagai transformasi elit dan organisasi menjadi sebuah partai politik. Partai Perindo di Sulawesi selatan khususnya di Makassar menjadi salahsatu kekuatan baru di tataran partai politik dalam hal ini melihat potensi dari sokongan media dan figure elit yang mengisi struktural partai tersebut . Pemilihan umum di tahun 2019 menjadi kontestasi perdana partai perindo dalam pemilihan umum di Makassar dan Sulawesi selatan. Data yang di tunjukkan pada pemilu legislatif DPRD Kabupaten/Kota 2019 menunjukkan hasil rekapitulasi dimana dalam kontestasi ini partai Perindo menempatkan 2 kursi di legislatif dimana pada dapil 3 wilayah (Tamalanrea dan Biringkanaya) menempatkan Syamsuddin Raga dengan perolehan suara (1.272 suara) dan di dapil 5 wilayah (Mamajang, Mariso, Tamalate) menempatkan Kartini dengan perolehan (3.124 suara). Capaian ini bukanlah capaian yang buruk karena mengingat di tahun 2019 merupakan laga pertama partai Perindo dalam pemilihan umum di Sulawesi selatan khususnya Makassar sekaligus peraih kursi terbanyak diantara partai-partai baru yang ikut dalam pentas politik seperti partai Berkarya, partai PSI dan partai Garuda.

HASIL HITUNG SUARA PEMILU LEGISLATIF DPRD KAB/KOTA 2019

WILAYAH PEMILIHAN PROV. SULAWESI SELATAN

Versi: 28 Jan 2020 19:00:05 Progress: 26.355 dari 26.356 TPS (99.99621%)



Struktural partai Perindo kota makassar saat ini di pimpin oleh Ruslan Mahmud sebagai ketua dewan pimpinan daerah (DPD) kota Makassar. Pengembangan jejaring politik partai Perindo merupakan sebuah strategi yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita partai terutama dalam pelembagaan partai tersebut . Hadirnya partai perindo sebagai sebuah partai dan kekuatan baru, sekaligus merupakan partai pemenang kursi terbanyak diantara partai-partai baru di kota Makasaar pada pemilihan legislatif tahun 2019 membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah peran elit dalam pengembangan jejaring politik partai Perindo di Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran elit dalam pengembangan jejaring politik partai Perindo di Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan maka didapatkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi peran elit dalam pengembangan jejaring politik partai Perindo di Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, alangkah baiknya untuk melihat penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai kajian dan perbandingan. Adapun hasil penelitian yang dijadikan bahan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu Institusionalisasi partai perindo di makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham Prawansyah yang telah melakukan penelitian mengenai " Institusionalisasi Partai Politik (Studi Tentang Konsolidasi Internal DPD II Golkar Makassar Menjelang Pilwalkot 2013) dengan memakai Metode penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi dan mendapatkan data dari wawancara, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perlawanan dari beberapa kader muda terhadap keputusan DPP Partai Golkar dalam rekomendasi dukungan dikarenakan penetapan pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid 75 pada Pilwalkot Makassar tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar. DPP mengindahkan hasil dari konsolidasi yang telah lama dibangun

kader di tingkat pengurus lokal untuk mengutamakan calon yang dapat diterima di masyarakat Makassar dan juga di internal Golkar Makassar²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Rahmat Hidayat tentang “Institusionalisasi Partai Politik (Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’ mang Tahun 2013) dengan memakai Metode deskriptif kualitatif dan mendapatkan data dari wawancara, menyimpulkan bahwa proses institusionalisasi DPW PAN mengenai kemampuan organisasional partai dalam menyikapi sebuah keputusan masih diwarnai dengan beberapa perbedaan pendapat. Tentunya secara prinsip kelembagaan, hal ini dapat berefek buruk terhadap kedaulatan institusi partai jika tidak mampu dikelola secara baik. Namun sebaliknya, ketika partai memiliki kemampuan manajemen konflik yang baik serta penerapan aturan secara maksimal dalam pola dan sikap partai, maka partai politik dapat terinstitusionalisasi secara optimal di tengah masyarakat.³

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Titin Purwaningsih tentang “ Analisis Institusionalisasi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung) dengan memakai Metode

² Ilham Prawansyah, Skripsi: “ Institusionalisasi Partai Politik (Studi Tentang Konsolidasi Internal DPD II Golkar Makassar Menjelang Pilwalkot 2013)” (Makassar:UNHAS, 2013).

³ Andi Rahmat Hidayat, Skripsi: “Institusionalisasi Partai Politik (Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’ mang Tahun 2013)” (Makassar:UNHAS, 2013).

penelitian kualitatif dan mendapatkan data dari wawancara, menyimpulkan bahwa: Pertama, tingkat Institusionalisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung, berada dalam kategori sedang dengan nilai (1,19). Kedua, kestabilan perolehan suara DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung tidak semata-mata dipengaruhi oleh institusionalisasi partai, tetapi dipengaruhi oleh dua faktor lain yang lebih dominan yaitu: praktek patronase dan klientelisme dalam pilgub dan pileg yang dilaksanakan secara bersamaan, hal itu dikarenakan tim sukses atau relawan dalam pilgub yang berasal dari luar Partai Demokrat secara tidak langsung turut serta mengkampanyekan Partai Demokrat dalam pileg, serta praktek patronase dan klientelisme yang dilakukan oleh caleg Partai Demokrat pada saat pileg.⁴

2.2 Teori Elit

Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup

- (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah.

⁴ Titin Purwaningsih (2016). "Analisis Institusionalisasi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung)". Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik, Vol 3.

(b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkar kekuasaan maupun yang sedang berkuasa.

Pareto

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.⁵

Berdasarkan teori elit formal adalah tokoh-tokoh yang menduduki jabatan strategis dan mempunyai legitimasi dari masyarakat untuk berkuasa, seperti pejabat di eksekutif dan legislatif. Pada dasarnya, orang-orang ini juga bisa berasal bahkan dari kalangan Grassroot atau orang-orang yang secara biologis merupakan kalangan keluarga pejabat.

⁵ Fadli, Muhammad., Bailusy, Kausar., Nas, Jayadi., dan Zulfikar, Achmad. 2015. "Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015", Vol.06, No.2.

Elit formal adalah orang-orang yang duduk di pemerintahan dan legislatif atau dengan kata lain orang yang mempunyai otoritas formal untuk memerintah, sedangkan elit non formal adalah orang-orang yang tidak mempunyai otoritas formal, berada di luar pemerintahan akan tetapi memiliki pengaruh yang kuat dan memiliki banyak followers atau pengikut. Hubungan Elit formal dengan Partai Politik tidak dapat dipisahkan, karena partai politik adalah alat kendaraan yang mengantarkan mereka menjadi pejabat yang mendapatkan legitimasi publik.⁶

Mosca

Mosca menyebutkan dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah. Mosca menolak semua klasifikasi bentuk pemerintahan yang pernah ada semisal aristokrasi, demokrasi, atau lain sebagainya, dalam kondisi masyarakat apapun baik pada masyarakat yang sudah maju maupun masyarakat yang kehidupan bernegaranya sedang berkembang. Menurutnya hanya ada satu macam bentuk pemerintahan yaitu oligarki yang dipimpin oleh sekelompok elit.

⁶ Ansyari, Irvan., Fachri, Adnan., dan Bakaruddin R. A. 2019. "Peran Elit Dalam Dominasi Partai Golkar Di Kabupaten Tanah Datar Sejak Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 6, No.2, Hal 403-416.

Keller

Elit menurut Keller padamulanya dipakai untuk membedakan minoritas-minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tatasosial dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan.⁷

2.3 Peran Elit

Integrasi Elit dengan Khalayak ialah upaya untuk menghubungkan antara golongan elit yang memerintah dan khalayak atau rakyat yang diperintah. Integrasi antara elit dan khalayak tidak berarti melenyapkan perbedaan diantara mereka. Kalau integrasi dilihat sebagai proses maka integrasi elit dengan khalayak merupakan proses kelembagaan rakyat.

Menurut Amin Khairul (2017)⁸, ada lima aspek yang berkaitan dengan elit dan kekuasaan politik yaitu;

1. Kekuasaan politik seperti halnya barang-barang sosial lainnya yang didistribusikan dengan tidak merata.

⁷ Rahmat, Bai. 2017. "Studi Kasus Peran Ulama Terhadap Pemenangan Sofyan Caleg Dapil I Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014", JOM FISIP, Vol. 4, No. 2.

⁸ Amin, Khairul. 2017. "Studi Relasi Antara Pemerintah dan Masyarakat di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kep. Bangka Belitung", Jurnal Sosiologi USK, Vol. 1, No. 2.

2. Kedua, pada hakikatnya orang dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan politik penting dan mereka yang tidak memilikinya.
3. Ketiga, secara internal, elit bersifat homogen, bersatu dan memiliki kesadaran.
4. Keempat, elit mengatur sendiri kelangsungan hidupnya, kemudian keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang terbatas.
5. Kelima, kelompok elit pada hakikatnya bersifat otonom

2.4 Partai Politik

Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan politike episteme yang berarti ilmu politik.⁹

Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil serta materiil (*A political, party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a*

⁹ Ellya, Rosana. 2012. "Partai Politik Dan Pembangunan Politik", Jurnal TAPIs, Vol.8, No.1.

government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages).

Fungsi Partai di Negara Demokrasi sebagai Sarana Komunikasi Politik. Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah

bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.

Sigmund Neumann

Dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.¹⁰

Adapun secara konstitusi di Negara Indonesia partai politik pada undang-undang no 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang tahun 2008 tentang partai politik mengenai prasyarat pendirian partai sampai tupoksi dan institusi partai.

Giovanni Sartori

Menurut Giovanni Sartori menyatakan partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Apa yang dikemukakan oleh Sartori secara substantif dapat dikatakan sama dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli lainnya. Beberapa hal yang dapat dianalisis dari definisi Sartori adalah sebagai berikut :

Pertama, jika Friedrich menyebutnya dengan sekelompok manusia, maka Sartori ,menyebutkan bahwa partai politik adalah “kelompok politik”. Tentu

¹⁰ Budiardjo, Miriam. 2008. “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

kata “sekolompok manusia” dengan “kelompok politik” memiliki makna yang berbeda, karna “sekolompok manusia” bermakna pejoratif, atau mungkin dapat dikatakan “kurang tertib”, kata “kelompok politik” , menunjuk kepada sesuatu yang memiliki makna lebih kepada politik. Itulah prinsip yang membedakan antara kata “sekolompok manusia” dan “kelompok politik” yang dikemukakan oleh Friedrich dan Sartori.

Kedua, partai politik sebagai kelompok yang dimaksud oleh Sartori memiliki satu tujuan, yakni untuk “mengikuti pemilihan umum”. Dalam konteks ini, jelas sekali tujuannya, karna hanya untuk mengikuti pemilihan umum, hal yang tidak dengan tujuan partai politik yang diketengahkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

2.5 Hukum Besi Oligarki Robert Michels

Diwaktu perang, kekuasaan pemerintah makin besar, sedangkan kekuatan oposisi partai-partai politik makin kurang efektif. Berkecamuknya perang yang sangat menyedihkan bagaikan topan ditengah malam tatkala seluruh umat sedang tidur nyenyak setelah bekerja sehari penuh. Topan tersebut berkecamuk diseluruh dunia dengan dahsyatnya dan samasekali tidak memperdulikan umat manusia ataupun tidak menghargai hasil-hasil kesenian sehingga membahayakan sokoburu peradaban yang sudah berabad-abad usianya. Salah satu sokoburu dari materialisme (historic materialism) adalah persatuan kelompok buruh diseluruh dunia dalam komunitas yang memiliki kepentingan sosial yang kokoh guna melawan

kelompok borjuis. Komunitas tersebut menimbulkan stratifikasi kelas secara horizontal yang melintas stratifikasi bangsa dan ras secara vertical pada hakikatnya perbedaan yang paling besar dalam pandangan diantara kelas-kelas sosial ekonomi dan bangsa merupakan perbedaan pandangan antara masing-masing penganut teori nasionalistis dan penganut teori materialisme sejarah yaitu bahwa yang pertama mengajukan suatu hipotesa bahwa konsep nasion secara moral dan positif lebih unggul daripada konsep *kelas* ,sedangkan yang terakhir menganggap secara realita konsep nasion jauh lebih rendah dari konsep kelas. Sebetulnya, kelompok marxis yakni bahwa kesadaran kelas sangat berpengaruh terhadap mentalitas kelompok proletar yang telah meresapi teori sosialis.

Peperangan yang telah berlangsung telah menghancurkan teori ini. Partai sosialis jerman yang paling kuat, kaya dan terorganisasi baik antara kelompok buruh internasional serta memiliki semangat memimpin selama 30 tahun terakhir tiba-tiba dan secara tegas menyatakan solidaritasnya terhadap kaisar jerman. Dikalangan massa proletar tidak pernah menentang secara moral terhadap perjuangan kelompok sosialis untuk berperang dan bertikai dengan rekan-rekan mereka dari Negara-negara lain demi imperialism jerman. Tidak dapat dibantah, bahwa siasat kelompok sosialis jerman disebabkan oleh kecenderungan oligarki yang di manifestasikan dalam partai-partai politik modern. Partai-partai itu mengejar tujuan yang revolusioner dan menentang sistem Negara yang berlaku untuk

menggantikannya dengan sistem yang lain, sehingga membutuhkan suatu organisasi besar yang mempunyai pusat kekuatannya dalam suatu birokrasi yang stabil dan terpercaya. Para anggotanya dibayar cukup baik, dan mereka memiliki kekuatan pers dan partai. Organisasi tersebut merupakan suatu pemerintahan dalam pemerintahan. Pada masa sekarang, betapapun baiknya kekuatan partai itu berlambang, tetapi kalah dalam kekuatan pemerintah, terutama di negara Jerman. Oleh karena itu, salah satu peraturan yang penting dari partai sosialis adalah larangan untuk memmentang pemerintah melebihi batas kemampuan partai yang di akibatkan oleh ketimpangan antara kedua kekuatan itu. Dengan lain perkataan, kehidupan partai yang pertahanannya lambat laun menjadi tujuan utama tidak boleh dikorbankan. Akibatnya adalah secara lahiriah partai dengan organisasinya yang birokratif menjadi lebih penting daripada jiwa partai, sedangkan usaha-usaha yang bersifat doctrinal dan teori akan dikorbankan apabila partai terlibat dalam pertikaian dan tidak menguntungkan dengan lawan-lawannya. Sebagai hasil perubahan tersebut adalah partai tidak lagi dianggap sebagai suatu alat untuk mencapai suatu tujuan tetapi menjadi tujuan tersendiri sehingga partai tidak mampu melawan kekuasaan pemerintah yang dilakukan secara kesewenangan.¹¹

Tentu partai tidak mampu menghadapi semacam ujian yang sedemikian dahsyat seperti mempertahankan kepercayaan dalam prinsipnya

¹¹ Michels Robert. 1984. "Partai Politik Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi", Jakarta: CV Rajawali.

bila pemerintah memutuskan untuk berperang dan bertekad untuk menghancurkan segala yang menghalanginya serta mengancam partai dengan penutupan cabang-cabangnya, penyitaan dananya dan penghukuman berat bagi orang-orangnya yang baik partai tidak mematuhi semua keputusan tersebut. Partai akan menyerah, dan cepat-cepat membuang jauh jiwa internasionalnya serta didorong naluri untuk menyelamatkan diri berubah sikap menjadi partai yang patriotik.

2.6 Institusionalisasi Partai Politik Huntington

Institusionalisasi partai politik adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan *value* (nilai) dan *stability* (stabilitas) tertentu. Ketika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik.¹² Ketidakmampuan partai politik untuk mengimplementasikan segala peran dan fungsinya dalam realitas politik menjadi hal yang memperpanjang catatan buruk bagi partai politik itu sendiri. Intitusionalisasi partai tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahankelemahan internal dan eksternal partai. Kemampuan eksternal dari partai politik yang belum berjalan fungsional secara baik,

¹² Primadi , Agam., Purwaningsi, Titin. 2019. "Institusionalisasi Partai Politik dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus: Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 3, No. 1, Hal. 63-78.

ditambah konflik internal organisasi yang semakin mengemuka sehingga menenggelamkan peran partai politik secara institusi.

Guelermo O'Donnell

Institusionalisasi partai politik menurut Guelermo O'Donnell melibatkan dua aspek penting, yaitu *value infusion* (nilai pemasukan) dan *behavioral routinization* (rutinitas perilaku). Pertama, *value infusion* merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser fokus dari tujuan-tujuan dan kepentingan individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi partai politik. Dari sini maka partai politik akan dapat mengembangkan legitimasi, penerimaan di masyarakat, dan tentunya mengakarnya partai politik (*party rootedness*). Kedua, *behavioral routinization*, hal ini terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang stabil, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan informal tertanam di dalam pola-pola aktivitas partai sehingga akan ada prediktabilitas dan reguritas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para anggota, pengurus partai politik, maupun masyarakat luas lainnya.¹³

2.7 Kerangka Pemikiran

Partai Perindo di Makassar lahir dan berkembang sebagai partai politik tidak terlepas dari peran elit-elit partai tersebut dalam mengupayakan terbangunnya komunikasi yang baik antar pengurus yang berada didalam

¹³ Andi, R. H. 2013. "Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013", Skripsi Institusionalisasi Partai Politik.

struktural partai. Laga perdana partai perindo dalam pemilihan di legislatif pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang cukup baik dimana partai perindo merupakan peraih kursi terbanyak diantara partai-partai baru yang bertarung pada saat itu seperti partai Berkarya, partai PSI, dan partai Garuda. Hasil tersebut tidak terlepas dari bagaimana peran dari elit partai tersebut dalam melakukan pelembagaan terhadap internal partai, hal ini ditunjukkan dari bagaimana upaya rekrutmen politik yang begitu serius dilakukan oleh partai dalam upaya menciptakan stabilitas ditubuh partai serta Manajemen partai juga sebagai salahsatu bagian penting dalam mengusung gerakan partai terutama mengorganisir orang-orang yang berada dalam struktural partai.

2.8 Skema Kerangka Pikir

